

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Puskesmas Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin

Yusdiana, Ririn Noviyanti Putri*, Rina SE Sitindaon

Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Kader Bangsa Palembang

Program Studi D-4 Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Kader Bangsa Palembang

*Correspondence: ririnnoviyanti95@gmail.com

Abstrak. Masalah stunting di Indonesia adalah ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Balita yang mengalami stunting memiliki risiko terjadinya penurunan intelektual, produktivitas dan peningkatan risiko penyakit degeneratif dimasa mendatang. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang terkait penanggulangan kejadian stunting, yaitu melalui Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018 tentang percepatan pencegahan stunting, pengendalian dan penurunan stunting terintegrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait penanggulangan stunting di Kota Palembang. Hasil penelitian yaitu implementasi kebijakan penurunan stunting sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018 dan Program Rembuk Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin bekerjasama dengan seluruh Puskesmas Kabupaten Banyuasin guna untuk Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Banyuasin, kejelasan kebijakan penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai telah disosialisasi kepada petugas kesehatan, staf dalam mendukung program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai sudah cukup, fasilitas yang tersedia untuk menjalankan program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai sudah layak dan sesuai, koordinasi pembentukan komitmen Puskesmas Pangkalan Balai melalui lintas sektor, SOP dalam implementasi kebijakan stunting sudah tersedia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pihak puskesmas untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan stunting.

Kata kunci : implementasi, kebijakan, stunting

Abstract. The problem of stunting in Indonesia is a serious threat that requires proper handling. Toddlers who are stunted have a risk of intellectual decline, productivity and an increased risk of degenerative diseases in the future. One of the policies made by the Palembang City Government related to tackling stunting incidents, namely through Banyuasin Regent Regulation Number 49 of 2018 concerning accelerating stunting prevention, controlling and reducing integrated stunting. The purpose of this study was to analyze government policies related to stunting prevention in the city of Palembang. The results of the study are that the implementation of the stunting reduction policy has been carried out properly in accordance with Banyuasin Regent Regulation Number 49 of 2018 and the Rembuk Stunting Program by the Banyuasin District Health Office in collaboration with all Banyuasin District Health Centers in order to Accelerate Stunting Reduction in Banyuasin District, the clarity of the stunting prevention policy at the Pangkalan Balai Health Center has been socialized to health workers, the staff in supporting the stunting prevention program at the Pangkalan Balai Health Center is sufficient, the facilities available to run the stunting prevention program at the Pangkalan Balai Health Center is appropriate and appropriate, coordination for the formation of Pangkalan Balai Health Center commitments through cross-sectors, SOPs for the implementation of the stunting policy are available. The results of this study are expected to be an illustration for the puskesmas to be able to further improve stunting services.

Keywords: implementation, policy, stunting

PENDAHULUAN

Saat ini stunting telah menjadi masalah prioritas global yang harus diatasi (Onis & Branca, 2018). Berbagai penelitian menemukan bahwa stunting berhubungan dengan penurunan konsentrasi, kerusakan memori, penurunan daya belajar, menurunkan prestasi sekolah dan penurunan fungsi kognitif, serta gangguan perkembangan motorik pada anak (Jesmin *et al.*, 2018). *The Global Nutrition Report* (2020)

melaporkan bahwa prevalensi *stunting* pada anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia masih tinggi dari rata-rata kawasan Asia Tenggara meskipun terjadi kemajuan dalam mencapai target penurunan *stunting*. Indonesia berada pada peringkat keempat dengan prevalensi tinggi *stunting* pada anak di bawah usia 5 tahun dikawasan Asia Tenggara setelah Timor Leste (51,7%), Laos (33,1%), dan Kamboja (32,4%). Menurut data Riset Kesehatan Dasar, prevalensi

stunting dari tahun ke tahun berturut turut dari tahun 2007, 2010, 2013 dan 2018 adalah 36,8%; 34,6%; 37,2%; dan 30,8% (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan data hasil integrasi antara SSGBI 2019 dan SUSENAS menunjukkan bahwa prevalensi nasional *underweight*, *stunting*, *wasting* berturut-turut adalah 7,4 %; 27,7%; dan 16,3%. Lebih dari 50% provinsi di Indonesia mempunyai prevalensi *stunting* melebihi dari angka nasional.

Salah satu kabupaten yang menjadi lokus *stunting* pada tahun 2022 yaitu Kabupaten Banyuasin. Penurunan pada Tahun 2021, angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Banyuasin sebesar 22 %, masih terdapat 3.510 Balita atau 6,31 % dari total populasi Balita di Kabupaten Banyuasin mengalami *stunting*. Angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Berdasarkan rembuk *stunting* yang dilakukan pada tanggal 4 agustus 2022, disepakati bahwa terdapat kecamatan yang menjadi lokus *stunting* yaitu kecamatan Banyuasin I, Banyuasin III, dan Air kumbang. Dari 3 kecamatan tersebut, yang paling banyak kasus *stunting* yaitu kecamatan Banyuasin III. Puskesmas Pangkalan Balai termasuk dalam kecamatan Banyuasin III. Penetapan locus *stunting* tahun 2022 ada tiga desa dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Pangkalan Balai yang termasuk locus *stunting*, yaitu Desa Regan Agung, Kelurahan Kayuara Kuning dan Desa Rimba Balai (Data Sekunder Puskesmas Pangkalan Balai, 2022).

Stunting merupakan konsekuensi dari beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan kemiskinan, termasuk gizi, kesehatan, sanitasi dan lingkungan. Menurut UNICEF dalam *United Nation Administrative Committee on Coordination/Sub-Committee on Nutrition (ACC/SCN)*, faktor yang menyebabkan *stunting* sangat beragam dan kompleks, secara umum dikategorikan menjadi tiga, yaitu akar masalah (*basic causes*), penyebab tidak langsung (*underlying causes*), dan penyebab langsung (*immediate causes*). Faktor sosial, ekonomi, politik merupakan *basic causes*; faktor ketersediaan pangan, pola asuh, dan pelayanan kesehatan merupakan *underlying causes*, sedangkan faktor asupan zat gizi dan penyakit merupakan *immediate causes*. Selain itu, faktor ekonomi yang mempengaruhi kejadian *stunting* adalah pendapatan dan pengeluaran untuk pangan (Aridiyah et al., 2018).

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin terkait

penanggulangan kejadian *stunting*, yaitu melalui Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018 tentang penurunan masalah gizi *stunting* di Kabupaten Banyuasin. Pada kebijakan tersebut berisi mengenai asas, prinsip dan pilar dalam pencegahan, pengendalian dan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Banyuasin yakni dengan melalui tenaga gizi yang terlatih, komunikasi, kerja sama dan koordinasi lintas sektor, transparan dan akuntabel dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan serta ibu menyusui dan anak diatas usia 6 bulan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan strategi edukasi Kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga, Gerakan masyarakat hidup sehat, dan Gerakan seribu hari pertama kehidupan. Diperlukannya sosialisai dan bimbingan teknis yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada semua petugas kesehatan, mengoptimalkan fungsi koordinasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* tersebut. Komunikasi sangat menentukan dari pencapaian tujuan sebuah implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* (Ulfani et al, 2018).

Selain itu, kejelasan, fasilitas dan SOP juga dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus jelas, fasilitas harus memadai dan SOP sebagai pedoman harus memiliki kejelasan yang dapat dimergeri oleh sasaran sehingga implementasi dari suatu kebijakan akan berhasil. Hasil penelitian Purlimaningsih (2017) menjelaskan sudah ada kewenangan dan legitimasi kepala puskesmas, komitmen, motivasi serta dukungan dari lintas sektor untuk mendukung pencapaian pelaksanaan penanggulangan kejadian *stunting* di Kabupaten Banyuasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Puskesmas Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan pedoman wawancara mendalam (*indepth interview*). Dalam hal ini fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan penanggulangan kejadian *stunting* di Puskesmas Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Pada penelitian ini informan ditentukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sumber informan didasarkan pada maksud yang telah

ditetapkan sebelumnya misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti mengetahui situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Program Stunting Puskesmas Pangkalan Balai. Sementara dari kriteria informan lainnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Puskesmas Pangkalan Balai

Kabupaten Banyuasin, dokter, Kepala TU, Petugas Gizi, Petugas Promkes di Puskesmas Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi data sedangkan analisis data pada penelitian kualitatif ini adalah analisis isi (*content analysis*).

HASIL

Tabel 1
Analisis Tema Kebijakan Program Stunting

Kutipan Wawancara	Koding	Kategori	Tema
“Kebijakan stunting di Puskesmas sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018” (P1)	Kebijakan Sudah Terlaksana	Implementasi Kebijakan Stunting di Puskesmas	Pelaksanaan Kebijakan Stunting
“Implementasinya sudah diterapkan mulai dari kelurahan...” (P2)	Implementasi di semua level		
“Sudah dilakuakn semua kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sudah melakukan juga intervensi gizi spesifik yang telah berkontribusi sebesar 70%” (P1)	Diterapkan sesuai aturan		
“...tentunya setiap kebijakan akan kita sosialisasinya...” (P1)	Dilakukan Sosialisasi	Sosialisasi Kebijakan	
“kebijakan tersebut disosialisasikan ke semua pegawai puskesmas, ke pemegang program yang ada dipuskesmas, kader- kader serta bidan”(P2)	Desiminasi ke semua pihak terkait dengan komunikasi Masyarakat		
“kebijakan ini tentunya sasaran kitake masyarakat ya, terumatama untuk ibu yang mempunyai balita.”(P1)		Sasaran dan Jangkauan	
Dalam rangka penurunan angka stunting ini adanya kader diposyandu serta bidan yang harus diberi pelatihan...”(P5)	Kader posyandu dan bidan		
“...Kabupaten Banyuasin memiliki daerah yang luas yang menyebabkan kesulitan dalam menjangkau daerah pedalaman”(P6)	Jangkauan yang luas		
Salah satu kendalanya pada implementasi program kegiatannya,salah satunya masih adanya kepercayaan kebudayaan serta masih banyaknya ibu hamil yang tidak mau minum tablet tambah darah...(P1)	Penolakan mengikuti kegiatan	Hambatan	

Sumber: Data olahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai untuk penurunan kasus stunting salah satunya yaitu melalui Pemerintah Kabupaten Banyuasin terkait penanggulangan kejadian stunting, yaitu melalui Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018. Implementasi kebijakan telah dilakukan di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut melalui berbagai macam bentuk kegiatan salah satunya melalui gizi spesifik yang berkontribusi sebesar

70%. Namun, terlepas dari berbagai macam bentuk program kegiatan dalam kebijakan tersebut, tentunya ada hambatan ataupun kendala dalam implementasinya. Dalam hal ini upaya peran tenaga Kesehatan sangatlah penting dalam penurunan stunting, selain itu agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan maka diperlukannya monitoring dan evaluasi setiap tahun dari kebijakan tersebut, seperti pemantauan status gizi balita maupun ibu hamil.

Tabel 2
Analisis Tema Kejelasan

Kutipan Wawancara	Koding	Kategori	Tema
“kita tentunya ada SOP di dalam kebijakan tersebut, selain itu juga ya bukan hanya kebijakan SOP stunting saja, karna stunting ini berhubungan dengan gizi maka ada juga SOP ASI Eksklusif, SOP PMT, SOP Pengukuran Status Gizi”(P1)	Ketersediaan SOP	Petunjuk Program	Kejelasan Informasi Kegiatan Program Stunting
“Sebelum pelaksanaan, tentunya kita melakukan sosialisasi agar tenaga kesehatan tersebut mengerti bagaimana SOP dalam pelaksanaan kebijakan tersebut... (P2)	Diseminasi	Upaya pemahaman terhadap kegiatan program	

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menjalankan suatu kebijakan atau program kesehatan tentunya harus mempunyai pedoman seperti SOP, juklak, juknis bagaimana program tersebut akan dilaksanakan dan apa tujuan serta sasarannya. Untuk mencapai tujuan dari suatu

program tersebut tentunya program itu harus disosialisasi kepada petugas kesehatan yang nantinya informasi tersebut bisa dimengerti dan dapat diterima oleh sasaran/masyarakat, dengan begitu semua program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Tabel 3
Analisis Tema Staf

Kutipan Wawancara	Koding	Kategori	Tema
“ya yang terlibat tentunya pemegang program, kepala puskesmas, petugas gizi, petugas promkes, bidan, dokter, serta kader posyandu”(P1)	Tenaga Kesehatan	Staf yang terlibat	Kecukupan dan kemampuan Staf yang optimal
“untuk saat ini stafnya sudah cukup... (P2)	Telah sesuai standar	Jumlah staf	
“kalau jobdesk tergantung surat tugas, misalnya dokter melakukan pemeriksaan, bidan memantau BB dan TB bersama kader, lalu dilakukan penyuluhan oleh petugas promkes, setiap orang berbeda jobdesknya”(P5)	Sesuai SK	Kesesuaian dengan jobdesk	
“Kalo pelatihan kita ikut tentang stunting, dinas yang ngasih pelatihan dan biasanya materinya tentang pengisian form serta bagaimana penurunan angka stunting”.(P1)	Pelatihan	Peningkatan Kemampuan Staf	

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa staf yang diperlukan dalam menjalankan program stunting di Puskesmas Pangkalan telah sesuai atau cukup. Selain itu, untuk menunjang

kegiatan program penurunan stunting, maka diperlukan kemampuan staff yang optimal, staff telah mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kemampuan.

Tabel 4
Analisis Tema Fasilitas

Kutipan Wawancara	Koding	Kategori	Tema
“Fasilitas kita lengkap,ada timbangan dan alat ukur tinggi badan, kemudian juga PMT dan juga tablet tambah darah kita selalu distribusikan, kemudian ada anggaran sendiri untuk puskesmas mengenai alat tulis dan lain lain, kecukupan fasilitas yang tersedia juga sudah cukup dan memadai”(P5)	Fasilitas tersedia dan mendukung	Ketersediaan Fasilitas	Kesesuaian Penyediaan Fasilitas

Sumber: Data olahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dalam menjalankan program penurunan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai telah tersedia dan cukup memadai, fasilitas yang diperlukan dalam menjalankan program

penurunan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai antara lain timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, tablet tambah darah, PMT dan alat tulis lainnya guna mendukung terlaksananya program stunting.

Tabel 5
Analisis Tema SOP

Kutipan Wawancara	Koding	Kategori	Tema
“Ada, SOP kita tentang stunting, sangat jelas isinya, Juklak, juknis ada seperti asi eksklusif, sop pemantauan berat badan, sop pemantauan gizi buruk, sop pemberian tablet fe dan PMT, semua ada sop”(P1)	SOP	Macam-macam SOP program stunting	Ketersediaan SOP

Sumber: Data olahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP dalam implementasi kebijakan stunting sudah tersedia berupa Petunjuk Teknis Penanggulangan Stunting, Petunjuk Tata Laksana Penanggulangan Stunting, SOP Penanganan Stunting, Tata Laksana Pemberian Makanan Tambahan, Tata Laksana Pemberian Tablet Tambah Darah, Pedoman Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dan semua SOP yang berhubungan dengan Penurunan Stunting di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan implementasi kebijakan stunting.

Kebijakan Penanggulangan Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan penanggulangan program stunting di Puskesmas Pangkalan Balai mendapatkan hasil bahwa implementasi kebijakan stunting di Puskesmas sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan stunting terintegrasi, SK Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan Puskesmas Pangkalan Balai telah melaksanakan Program Kebijakan Stunting guna merurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa implementasi kebijakan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai telah terlaksana, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi telah mensosialisasikan kebijakan penanggulangan stunting kepada Puskesmas. Program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan balaiterdiri dari penyuluhan, kunjungan rumah, pengukuran BB dan TB bayi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dari implementasi kebijakan penurunan angka stunting telah dilakukan baik kepada sasaran seperti memberikan makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi dan protein kronis, pemberian TTD sebanyak 90 butir, memberikan kelambu sebagai pencegahan dari penyakit malaria. Sedangkan pasca kehamilan, upaya yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan yaitu melakukan IMD, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI Eksklusif, serta menganjurkan untuk dapat imunisasi lengkap pada bayi, menyediakan obat cacing dan oralit untuk pencegahan maupun pengobatan diare.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Priyanti (2018) bahwa upaya yang telah ditetapkan dalam penurunan angka stunting yakni menurunnya angka kejadian stunting, kejadian wasting dan mencegah kejadian overweight pada balita, menurunkan angka kejadian anemia pada WUS, menurunkan angka kejadian BBLR, meningkatkan angka cakupan pemberian ASI eksklusif. Upaya yang ditetapkan tersebut, dilakukan dengan pemberian TTD pada ibu hamil, menganjurkan untuk ASI Eksklusif, memberikan makanan pendamping ASI, menganjurkan imunisasi dasar lengkap serta memberikan vitamin A (Priyanti, 2018).

Upaya-upaya penanggulangan program stunting yang telah dilakukan antara lain pemberian TTD pada ibu hami yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Faktor penyebab terjadinya stunting salah satunya yaitu anemia pada ibu hamil maka dari itu pemberian TTD pada ibu hamil sangat efektif dalam penanggulangan kejadian stunting. TTD tersebut harus dikonsumsi sama ibu hamil sebanyak 90 tablet selama mengandung. TTD tersebut telah terdistribusi secara baik pada sasaran yakni ibu hamil, hanya saja dalam pemanfaatannya belum bisa diukur karena tidak adanya pengawasan mengenai kepatuhan minum obat yang telah diberikan kepada ibu hamil.

Ibu hamil dengan status gizi yang kurang baik atau mengalami KEK dapat beresiko untu dapat melahirkan anak yang stunting. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan permasalahan tersebut dengan cara pemberian PMT pada ibu hamil, menganjurkan ibu untuk imunisasi dasar lengkap pada bayi yang dapat meminimalisir terjadinya penyakit infeksi pada bayi. Bayi yang pernah mengalami penyakit infeksi akibat tidak

mendapatkannya imunisasi dasar yang lengkap yang dapat menggugung proses tumbuh kembang dan beresiko untuk mengalami stunting (Wahdah, 2018).

Pemberian vitamin A pada bayi dan balita juga dapat dinilai efektif dalam mencegah infeksi pada bayi maupun balita karena bermanfaat sebagai anti oksidan yang mampu mencegah infeksi pada bayi dan balita, sedangkan PTM pada balita yang sudah terlanjur stunting dianggap kurang efektif dalam mengintervensi kejadian stunting. Adapun manfaat PMT tersebut dapat memperbaiki status gizi, namun tidak dapat mengintervensi atau mengurangi angka kejadian stunting (Ulfani, 2018). Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam percepatan penurunan angka stunting di Banyuasin yakni melalui intervensi gizi spesifik pada 1000 HPK anak yang akan dilakukan oleh sektor kesehatan, sasaran dari kebijakan ini tentunya adalah masyarakat. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk meningkat status gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan edukasi kesehatan, pelatihan maupun penyuluhan mengenai gizi melalui kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, dan memperkuat gerakan 1000 HPK (Aridiyah, 2018).

Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin tersebut tentunya berpacu pada Peraturan Presiden No 42 Tahun 2013 mengenai Gerakan Nasional Perbaikan Gizi yang bertujuan untuk mempercepat perbaikan gizi dalam 1000 HPK. Instrumen yang ada dalam kebijakan tersebut sudah dapat dikategorikan lengkap, dan dalam saat ini implementasinya membutuhkan upaya-upaya yang terorganisir dan memerlukan kerjasama stakeholder yang terkait. Untuk mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin ini, dibutuhkan upaya-upaya yang konkrit yang berfokus pada 1000 HPK serta integrasinya secara lintas program maupun lintas sektoral serta didukung dengan semua stake holder yang terkait.

Kejelasan Kebijakan Penanggulangan Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menjalankan suatu kebijakan atau program kesehatan tentunya harus mempunyai pedoman seperti SOP, juklak, juknis bagaimana program

tersebut akan dilaksanakan dan apa tujuan serta sasarannya. Untuk mencapai tujuan dari suatu program tersebut tentunya program itu harus disosialisasi kepada petugas kesehatan yang nantinya informasi tersebut bisa dimengerti dan dapat diterima oleh sasaran/masyarakat sehingga program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kejelasan yang dimaksud yakni kejelasan dalam berkomunikasi harus jelas dan dimengerti. Komunikasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan harus bisa dimengerti oleh khalayak sehingga tidak terjadinya salah penafsiran. Komunikasi yang disampaikan harus bisa dimengerti oleh masyarakat makna pesan yang sesungguhnya.

Upaya dalam penurunan angka stunting ini memerlukan kerja sama yang baik antar lintas sektor seperti sektor kesehatan maupun sektor non kesehatan dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Penurunan angka stunting yang didukung oleh intervensi gizi sensitif telah berkontribusi sebanyak 70 persen dengan kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya yakni masyarakat seperti PPKB dan PPA Kabupaten Banyuasin yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dengan cara melakukan penyuluhan ke desa. Kegiatan yang dilakuak seperti melakuakn penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan stunting (Agustian *et al*, 2018).

Staf Kebijakan Penanggulangan Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa staf yang diperlukan dalam menjalankan program stunting di Puskesmas Pangkalan telah sesuai atau cukup. Selain itu, untuk menunjang kegiatan program penurunan stunting, maka diperlukan kemampuan staff yang optimal, staf telah mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kemampuan. Pada implementasi kebijakan hal utama yang harus diperhatikan salah satunya yakni staf. Permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan sepeti tidak terpenuhinya SDM yang memadai, serta SDM yang ada tidak kompeten. Dalam menyelesaikan permasalahan SDM yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan tidaklah cukup dengan hanya penambahan SDM saja, namun diperlukannya penambahan SDM dengan kemampuan yang kompeten pada bidang yang ditentukan (Purlimaningsih *et al*, 2017).

Staff yang terlibat dalam kebijakan stunting adalah semua staf terkhusus kepala

program stunting, namun karena kebijakan stunting merupakan kebijakan lintas sektor oleh karena itu yang terlibat dalam kebijakan ini adalah pemegang program gizi, kepala Puskesmas, bidan, dokter, petugas promosi kesehatan serta kader posyandu. *Jobdesk* bagi setiap staf yang terlibat dalam program kebijakan penanggulangan stunting tersebut berbeda. Dokter melakukan pemeriksaan dan diagnosa awal, kemudian pemegang program memantau angka kejadian stunting, kader posyandu melakukan pemantauan dan pemegang program promkes melaksanakan penyuluhan, jadi setiap staff berbeda jobdesk tergantung dengan surat tugas yang diberikan. Peran petugas kesehatan merupakan faktor pendorong untuk penemuan kasus stunting. Pencapaian target tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan kegiatan di Puskesmas saja, akan tetapi diperlukan strategi inovatif lainnya terutama pada sumber daya manusia. Salah satu unsur pokok yang dibutuhkan dalam keberhasilan pengontrolan program penanggulangan stunting adalah staf yang cukup untuk mengatur orang-orang dalam penemuan kasus serta mempunyai peran penting dalam proses pelaksanaan program penanggulangan stunting (Purlimaningsih et al, 2017).

Fasilitas Kebijakan Penanggulangan Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dalam menjalankan program penurunan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai telah tersedia dan cukup memadai, fasilitas yang diperlukan dalam menjalankan program penurunan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai antara lain timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, tablet tambah darah, PMT dan alat tulis lainnya guna mendukung terlaksananya program stunting. Menurut Kemenkes RI (2018) fasilitas kesehatan adalah fasilitas umum yang merujuk pada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan swasta dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Peralatan kesehatan termasuk fasilitas kesehatan yang merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu puskesmas berkembang atau tidak adalah keadaan jumlah pasien pemanfaatan pelayanan yang ada di puskesmas tersebut serta sarana pelengkap bagi

puskesmas dalam menjalankan suatu program. Faktor yang tak kalah penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting yaitu Fasilitas pendukung, karena dengan adanya fasilitas yang memadai maka implementasi kebijakan penanggulangan stunting akan berhasil (Agustian et al, 2018).

SOP Kebijakan Penanggulangan Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pedoman dalam melakukan kebijakan program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai didapatkan hasil bahwa terdapat Petunjuk Teknis Penanggulangan Stunting, Petunjuk Tata Laksana Penanggulangan Stunting, SOP Penanganan Stunting, Tata Laksana Pemberian Makanan Tambahan, Tata Laksana Pemberian Tablet Tambah Darah, Pedoman Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dan semua SOP yang berhubungan dengan Penurunan Stunting di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan implementasi kebijakan stunting. Dalam melakukan kebijakan program penanggulangan stunting di puskesmas diperlukannya SOP yang mengatur pelaksanaan kebijakan stunting ini yang didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Implementasi suatu kebijakan bersifat kompleks sehingga memerlukan kerja sama berbagai stake holder. Struktur birokrasi harus kondusif dalam sebuah implementasi kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan serta dapat menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. SOP merupakan salah satu dari 2 karakteristik utama dari birokrasi (Beal et al, 2018) Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman bagi para pekerja dalam melakukan setiap kegiatan rutin yang akan dijalankan setiap harinya. SOP juga dapat membuat para pegawai memmanage waktu dengan baik serta dapat menyeragamkan tindakan dalam organisasi yang kompleks tersebut dengan tujuan untuk menimbulkan fleksibilitas yang besar dalam penerapan peraturan. Prosedur atau peraturan perencanaan yang terorganisir atas program-program yang fleksibel dapat membuat tanggung jawab yang baik dibandingkan dengan birokrasi yang tidak mempunyai ciri-ciri khusus (Fikadu et al, 2018).

SIMPULAN

1. Implementasi kebijakan penurunan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai sudah

- dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018 tentang Percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan stunting terintegrasi, dan Program Rembuk Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin bekerjasama dengan seluruh Puskesmas Kabupaten Banyuasin guna untuk Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Banyuasin.
- Kejelasan kebijakan penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai telah disosialisasi kepada petugas kesehatan yang nantinya informasi tersebut bisa dimengerti dan dapat diterima oleh sasaran atau masyarakat.
 - Staf dalam mendukung program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai sudah cukup. Petugas juga telah diberi pelatihan untuk menunjang kemampuan staf yang optimal.
 - Fasilitas yang tersedia untuk menjalankan program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai sudah layak dan sesuai.
 - SOP dalam implementasi kebijakan stunting sudah tersedia berupa Petunjuk Teknis Penanggulangan Stunting, Petunjuk Tata Laksana Penanggulangan Stunting, SOP Penanganan Stunting, Tata Laksana Pemberian Makanan Tambahan, Tata Laksana Pemberian Tablet Tambah Darah, Pedoman Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dan semua SOP yang berhubungan dengan Penurunan Stunting di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan implementasi kebijakan stunting.
- #### DAFTAR PUSTAKA
- Agustian Y, Rusmil K, Solek P. 2018. Hubungan faktor sosio ekonomi dengan perawakan pendek anak usia 24-60 bulan. *Sari Pediatri*. 20(2), 106–114.
- Aridiyah FO, Rohmawati N, Ririanty M. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada anak balita di wilayah pedesaan dan perkotaan. *Pustaka Kesehatan*. 3(1), 163–170.
- Beal T, Tumilowicz A, Sutrisna A, Izwardy D, Neufeld LM. 2018. A review of child stunting determinants in Indonesia. *Matern Child Nutr*. 14(4), e12617.
- de Onis M, Branca F. 2018. Childhood stunting: a global perspective. *Matern Child Nutr*. 12(1), 12–26
- Fikadu T, Assegid S, Dube L. 2018. Factors associated with stunting among children of age 24 to 59 months in Meskan District, Gurage Zone, South Ethiopia: a case-control study. *BMC Public Health*. 14(800).
- Jesmin A, Yamamoto SS, Malik AA HA. 2018. Prevalence and determinants of chronic malnutrition among preschool children: a cross-sectional study in Dhaka City, Bangladesh. *J Heal Popul Nutr*. 29(5), 494–499.
- Kemenkes RI. 2018, *Laporan nasional riskesdas 2018*. Jakarta
- Kemenkes RI. 2018, *Buku saku pemantauan status gizi tahun 2018*. Jakarta.
- Priyanti S, Syalfina AD. 2018. Determinan sosial terhadap kejadian stunting pada anak usia di bawah lima tahun. *Jurnal Kebidanan*. 7(2), 95–102.
- Purliamaningsih, N.P., Suarjana, K., Januraga, P.P. 2017. The Role of Communication Contact in Capitation Implementation at Public Health Centres in Denpasar. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 5(2), 197-204.
- Puskesmas Pangkalan Balai. 2022. *Data Sekunder Kejadian Stunting*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &B*. Bandung : Alfa Beta.
- Ulfani DH, Martianto D, Baliwati YF. 2018. Faktor-faktor sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat kaitannya dengan masalah underweight, stunted, dan wasted di Indonesia: pendekatan ekologi gizi. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 6(1), 59–65.
- Wahdah S, Juffrie M, Huriyati E. 2018. Faktor risiko kejadian stunting pada anak umur 6-36 bulan di wilayah pedalaman Kecamatan Silat Hulu, Kalimantan Barat. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia*. 3(2), 119–130